

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG PASAR  
SELODANG KELAPA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**Oleh : Candra Saputra**

[Cs.moutana@gmail.com](mailto:Cs.moutana@gmail.com)

**Pembimbing : Sujianto**

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5

Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

***Abstract***

*Selodang Kelapa Market is the largest market in Indragiri Hilir regency who shaped existence of floating market in Tembilahan, while there are some problems happend for Department of industry and trade Indragiri Hilir Regency. The merchant market that still put the merchandise in the land park and the funds budgeted for the facilities of the market made traders It is still minimal. This research aims to look at how Structuring the market Selodang Kelapa Tembilahan as a market that has a floating building can be well-ordered. This research uses qualitative research methods by examining the descriptive data according to the concepts of the theory of implementation. In data collection, researchers use interview techniques, observation and documentation. These researchers also use key informants as a source of information and as a source of triangulation technique in testing kevaliditan data. The results of this study indicate that the structuring the market does not run properly. This is proven by the communication, resources, Disposition and organizational structure is still not optimal. Restricting factors in structuring the market traders, namely budget, Policy Evaluation and the construction of the merchant Market Selodang Kelapa. This is caused due to lack of support and lack of assistance from the Government of the State of Indragiri District thus making a market trader of selodang Kelapa Structuring has not been optimal.*

**Keywords:** *Structuring, Traders, Selodang Kelapa Market*

## PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara terletak pada pelaku utama atau subjek dari aktivitas pembangunan ekonomi itu sendiri. Pelaku utama tersebut yaitu masyarakat.

Keberhasilan pembangunan ekonomi akan berakibat pada kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara karena dengan adanya pembangunan ekonomi, kekayaan negara dan masyarakat akan meningkat. pembangunan ekonomi juga termasuk pertumbuhan ekonomiyang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha guna meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar di Indonesia sehingga membuat roda perekonomian berjalan dengan cepat di daerah ini. Hal tersebut membuat masyarakatnya membutuhkan sebuah pasar yang representatif untuk mendapatkan kebutuhan primer dan sekunder. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Tradisional Pasal 1 bagian 24 menjelaskan bahwa Pasara Tradisional adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya

meliputi satu wilayah Kabupaten dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar atau kelurahan. Beberapa pasar tradisional yang di Tembilhandapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Pasar Tradisional di Tembilahan**

No	Nama Pasar	Alamat
1	Pasar Kayu Jati Tembilahan	Jalan Kayu Jati
2	Pasar Pagi	Jalan Baharuddin Yusuf
3	Pasar Selodang Kelapa	Jalan Yos Sudarso
4	Pasar Pusat Dayang Suri	Jalan Jendral Sudirman
5	Pasar Pusat Kuliner Kelapa Gading	Jalan R. Soebrantas

*Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, 2018*

Data diatas dapat dilihat bahwa Tembilahan mempunyai lima pasar tradisional yang tersebar di setiap daerah di Tembilahan salah satunya yang berada ditepi laut yaitu Pasar Selodang Kelapa. Pasar Selodang Kelapa merupakan sebuah pasar tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan disebuah bangunan yang dibangun diatas air. Pasar Selodang Kelapa ini terletak di Kabupaten Indragiri Hilir yang lokasinya berada di pesisir

timur Pulau Sumatera sekaligus menjadi pintu gerbang selatan dari Provinsi Riau. Wilayah daerah Indragiri Hilir merupakan dataran rendah berupa rawa (gambut) yang memanjang dari barat laut ke tenggara dan selatan.

Pasar Selodang Kelapa di Tembilahan ini terkenal sejak lama dulunya ialah Pasar Tradisional yang perbelanjaannya di atas perahu-perahu di mana para pedagang menjual sayur mayur, sembako, dan berbagai kebutuhan sandang dan pangan lainnya di perairan sungai-sungai di Tembilahan. Berikut Analisa Sarana dan Prasarana Pasar Selodang Kelapa di Kabupaten Tembilahan :

**Tabel 1.2. Analisa Sarana dan Prasarana Pasar Selodang Kelapa di Kabupaten Tembilahan.**

No	Aspek yang Ditinjau	Penerapan di Lapangan		
		Baik	Kurang	Buruk
1	Penempatan pedagang dilakukan memberi peluang yang sama bagi para pedagang	✓		
2	Zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan		✓	
3	Penempatan pedagang pada tempatnya tidak memakai lahan parkir			✓

4	Sarana lapak yang diberikan baik			✓
5	Pemberian fasilitas perolehan pinjaman lunak	✓		
6	Menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pedagang pasar yang lapaknya rusak		✓	
7	Sampah pasar di kelola dengan baik dan diangkut pada waktunya			✓
8	Setiap pemegang ijin dan ID CARD wajib menyediakan tempat sampah di dasarnya			✓
9	Menempatkan, menyusun bara barang dagangan dan atau peralatan lain			✓
10	Lahan Parkir tersedia		✓	

Keterangan : - Perda Kab. Indragiri Hilir Nomor 16 tahun 2009  
 - Perda Kab. Indragiri Hilir Nomor 23 tahun 2005

Berdasarkan fenomena diatas bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang ada masih dikatakan belum maksimal merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2005 Mengenai Pasar yang ada di selodang Kelapa yang menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir di bidang pasar, namun saat ini para pedagang di Pasar Selodang Kelapa tidak lagi melakukan transaksi jual beli diatas perahu melainkan diatas sebuah bangunan yang dibangun diatas air tepatnya ditepian laut Tembilahan.

Berkurangnya minat masyarakat untuk berjualan diatas perahu membuat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berinisiatif untuk membangun sebuah pasar tradisional ditepian laut agar keunikan Pasar dengan Bangunan Tradisional dapat dipertahankan. Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya Pemerintah Daerah sebagai instansi pelayanan publik, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Instansi Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mengelola semua pasar tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir termasuk Pasar Selodang Kelapa. Beberapa jenis dagangan yang dijual dan jumlah kios yang ada di Pasar Selodang Tembilahan dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Kios dan Jenis Dagangan di Pasar Selodang Kelapa**

No	Jenis Dagangan	Jumlah Kios
1	Sayur	102
2	Sembako	328
3	Ikan dan Daging	210
4	Minuman dan Makanan	129
	Jumlah	769

*Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, 2018*

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jumlah kios yang paling banyak terdapat di Pasar Selodang Kelapa Tembilahan ialah kios sembako dengan jumlah kios sebanyak 328 buah kios. Setelah itu kios ikan dan daging yang mempunyai selisih sekitar 118 buah kios dibandingkan dengan jumlah kios sembako yang ada. Walaupun memiliki jumlah kios yang banyak, namun jumlah kios yang sudah ditempati di Pasar Selodang Tembilahan hanya sekitar 80% dari jumlah kios yang ada atau sekitar 615 kios yang ditempati oleh para pedagang. Sedangkan jumlah pedagang yang ada di Pasar Selodang Kelapa sebanyak lebih kurang 567 pedagang.

Penataan Pasar Selodang Kelapa di Indragiri Hilir tentunya berkaitan dengan Peraturan Daerah mengenai penataan pasar Selodang Kelapa di Tembilahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasar dan kondisi pasar yang lebih baik serta untuk digunakan sebagai tempat transaksi jual beli masyarakat dan menunjang Pendapatan Asli Daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar Selodang Kelapa dalam penataan pedagang pasar juga mengintruksikan kepada petugas

penataan pedagang apabila terdapat pedagang yang sengaja tidak mau menurut intruksi dalam penataan pedagang maka akan dilakukan sosialisasi secara terus menerus akan pentingnya dilaksanakan penataan pedagang kepada para pedagang di pasar selodang kelapa tersebut. Walaupun dengan adanya bangunan khusus Pasar Selodang Kelapa saat ini tidak membuat pasar selodang menjadi daya tarik bagi para pembeli dan para pedagang masih tidak tertata rapi dalam penataan pasar dikarenakan lokasi yang sudah ada tidak dipakai karena ada bangunan yang sudah rusak dan tidak layak untuk ditempati serta sepi pembeli melewati area bangunan yang rusak tersebut, Hal tersebut disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana penunjang di Pasar Selodang Kelapa dari beberapa fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG PASAR SELODANG KELAPA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**.

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, data-data yang diperoleh berkaitan dengan penelitian ini akan diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indragiri Hilir sesuai dengan judul penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Selodang Kelapa oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.

Pengambilan Pedagang Pasar Selodang Kelapa sebagai fokus dalam penelitian ini karena pasar ini merupakan pasar tradisional yang terletak di tepi laut Tembilahan dan terbesar yang ada di Kabupaten Indragitri Hilir, selain itu Pasar Selodang Kelapa juga mempunyai daya tarik karena lokasi bangunannya yang berada di bibir sungai indragiri hilir membuat pasar ini berbeda dengan pasar tradisional lainnya yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

### **2. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan kepada peneliti. Informan adalah suatu istilah yang memberikan data dalam bentuk informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti memilih informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sesuai dengan masalah dan tujuan yang didapatkan dari penelitian ini, maka peneliti menetapkan beberapa yang akan menjadi informan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir
- c. Kepala Seksi Prasarana dan Penempatan Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir
- d. Kepala Seksi Pembinaan dan Retribusi Dinas Perindustrian

- dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir.
- e. Kepala Seksi Ketertiban dan Penyuluhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir
- f. Pedagang Pasar Selodang Kelapa Tembilahan

### 3. Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode – metode sebagai berikut:

#### a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dalam permasalahan yang dihadapi yaitu dari data tentang Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Selodang Kelapa oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dan diperlukan untuk mengumpulkan data yang sudah ada berupa dokumen atau catatan yang sesuai dengan subjek penelitian. Adapun data-data yang diperlukan antara lain :

- a. Jumlah Pasar Tradisional di Tembilahan
- b. Jumlah Kios dan Jenis Dagangan di Pasar Selodang Kelapa Tembilahan
- c. Dokumen Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini penulis menggunakan cara sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi menurut **Sutrisno Hadi** dalam **Hariandi (2015:34)** mengemukakan bahwa observasi

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Agar peneliti mendapatkan gambaran selengkap mungkin, maka peneliti mengadakan pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada dilapangan. Observasi ini yaitu pengamatan langsung pada objek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu Penataan Pedagang Pasar Selodang Kelapa oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Indragiri Hilir.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui percakapan langsung atau dikenal dengan interview atau wawancara antara peneliti dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan informan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

#### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku, referensi-referensi dari hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau dapat juga diambil dari beberapa dokumen mengenai gambaran umum lokasi penelitian seperti dalam perda serta hal-hal lain yang dapat mendukung hasil penelitian.

### 5. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yang bersifat penalaran mengenai fenomena-fenomena yang akan diteliti, setelah data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, kemudian penulis menganalisa data secara analisis deskriptif sesuai dengan hasil penelitian yaitu Implementasi



Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Selodang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam penelitian ini digunakan prinsip analisis kualitatif, dengan menggunakan triangulasi data dengan melakukan proses *check* dan *recheck* antara satu informan dengan informan lainnya. Menurut Milles dalam Hariandi (2015:37) tahap analisis data adalah sebagai berikut :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pemerhatian pada pemyedarhaan, pengabstarkan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Cara mereduksinya dengan meringkas, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya dituangkan dalam berbagai jenis tabel, grafik atau bagan. Penyajian data yang dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

#### 3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi.

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, tukar pikiran diantar teman sejawat, atau meminta respon atau komentar kepada informan yang telah dijaring datanya untuk membaca

kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kekokohnya dan kecocokannya.

## HASIL

### **A. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Selodang Kelapa oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir.**

Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Selodang Kelapa Tembilaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasar dan kondisi pasar yang lebih baik. Penataan Pedagang Pasar Selodang Kelapa Tembilaan ini harus diperhatikan dan dipertimbangkan demi mewujudkan pengelolaan yang baik. Untuk melakukan pengelolaan tersebut dibutuhkan suatu perencanaan yang strategis agar nantinya kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Selodang Kelapa oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah khususnya di daerah Kabupaten dilatar belakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan

mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang.

Penataan Pedagang Pasardengan rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian pekerjaan dalam mencapai tujuan tertentu. Agar pelaksana kebijakan Pedagang Pasar Selodang Kelapa dapat berjalan dengan baik telah dibagi rangkaian tugas atau pekerjaan yang terdapat dalam tersebut, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Komunikasi

Salah satu cara untuk menciptakan keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah kepada masyarakat khususnya kepada pedagang yang menjadi target atau sasaran kebijakan tersebut harus ditransmisikan dengan baik kepada. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui samasekali oleh kelompok sasaran, maka inilah yang akan menyebabkan terjadinya kesimpang siuran yang juga akan sangat berdampak terhadap tujuan utama yang di harapkan Pemerintah Indragiri Hilir sendiri, oleh sebab itu maka dipandang perludanya komunikasi yang baik dan tepat kepada pihak tertentu.

Komunikasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat serta mengarahkan pengelolaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Komunikasi untuk menjamin kelancaran prosedur kerja dari beberapa satuan kerja yang merupakan komponen atau bagian dari organisasi secara keseluruhan, yang masing-masing menjalankan sebagian dari tugas dan fungsi sebagai akibat dari spesialisasi dan

fungsionalisasi. usaha mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, mencegah adanya kesimpangsiuran atau pertentangan, tumpang tindih, kesenjangan dalam pengelolaan tugas pekerjaan serta meningkatkan efisiensi.

#### 2. Sumber Daya.

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting agar implementasi sebuah kebijakan yang sudah dibuat dapat dijalankan dengan baik dan benar. Tanpa adanya sumber daya yang baik, maka sudah dipastikan bahwa implementasi sebuah kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik. Inilah salah satu alasan utama tentang pentingnya ketersediaan sumber daya khususnya sumber daya manusia.

Sumber daya yang diperlukan dalam suatu kebijakan tidak hanya mengenai biaya. Akan tetapi, sumber daya juga terkait dengan sumber daya manusia, dan fasilitas yang disediakan. Pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena apapun jenis kebijakan tersebut sangat memerlukan dukungan para pelaksana. Para pelaksana diharapkan paham apa tujuan dari pelaksanaan kebijakan. Tidak hanya dukungan staf dan para pelaksana, dukungan finansial, dan dukungan sarana dan prasarana juga sangat penting untuk lancarnya suatu implementasi kebijakan.

Kompetensi aparatur yang tinggi akan lebih cepat mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya, sebaliknya apabila kompetensi aparatur rendah kecenderungan tujuan organisasi yang akan dicapai akan lambat bahkan menyimpang dari rencana semula. Untuk menciptakan



tujuan yaitu eksistensi pasar tradisional dibutuhkan pula aparatur berkompeten yaitu mampu dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan. Birokrat yang profesional harus mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan kompetensi yang tinggi tersebut yang profesional dan memiliki kompetensi yang tinggi

### 3. Disposisi

Disposisi yaitu sikap pelaksana untuk mempunyai kemauan atau niat atau motivasi psikologis untuk melaksanakan kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

### 4. Struktur Birokrasi.

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standar Operating/SOP), ini menjadi pedoman bagi setiap implementor didalam bertindak.

## **B. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Selodang Kelapa Tembilihan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir.**

### **1. Anggaran**

Anggaran merupakan alat untuk pedoman kerja dalam menjalankan

kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran atau pendanaan faktor yang sangat penting dalam Penataan Pedagang Pasar Selodang Kelapa. Dalam mewujudkan hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan memperoleh dana yang bersumber dari Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir. Namun dana yang telah disediakan belum mencukupi untuk Pelaksanaan Penataan Pedagang Pasar Selodang Kelapa.

### **2. Evaluasi Kebijakan.**

Penilaian yang dimaksud disini adalah penilaian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan guna untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir.

Evaluasi Kebijakan sebagai suatu proses penentu, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu apakah perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana. Evaluasi kebijakan memiliki arti suatu proses mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu evaluasi dikatakan penting karena tanpa adanya evaluasi dan pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi sendiri maupun bagi para pekerjanya.

### **3. Pembinaan Pedagang Pasar Selodang Kelapa.**

Pemberian pembinaan kepada pedagang merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertujuan untuk memperbaiki sikap, pola pikir dan

prilaku pedagang akan hak dan kewajibannya sebagai pedagang. Dalam hal ini, pemberian pembinaan pedagang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pedagang akan pentingnya dilakukannya penataan pedagang guna kelancaran penataan pasar

#### **A. Kesimpulan**

1. Penataan Pasar Selodang Kelapa Tembilahan sebagai Pasar Tradisional di Tembilahan dinyatakan tidak berjalan dengan semestinya. Adanya pedagang yang berjualan tidak ditempat yang ditentukan, lebih menjual barang dilahan parkir, dan sampah penjual yang berserak di sekitar pasar. Rasionalisasinya minimnya anggaran yang paling penting dalam kegiatan pengelolaan, tanpa anggaran kegiatan pengelolaan akan lumpuh.
2. Dalam pelaksanaan Penataan Selodang Kelapa Tembilahan sebagai destinasi Tembilahan dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah Anggaran, Evaluasi Kebijakan dan Pembinaan Pedagang Pasar Selodang Kelapa. minimnya anggaran membuat pembangunan pasar belum terealisasikan dan pengelolaan menjadi kurang baik dan sumber daya manusia yang tidak memadai menjadi penghambat Penataan Pedagang Pasar Selodang Kelapa Tembilahan, hasil menunjukan para pegawai kurang dalam mengerjakan tugas dan fungsi mereka sehingga pengelolaan pasar menjadi kurang maksimal.

#### **B. Saran**

1. Untuk mempermudah pelaksanaan Penataan Pasar Selodang Kelapa Tembilahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat membuat kebijakan khusus tentang Penataan Pedagang pasar tradisional agar dapat berjalan dengan optimal
2. Pasar Selodang Kelapa perlu diperhatikan lagi mengingat pasar ini merupakan pasar tersebar yang ada di Kabupaten Indargiri Hilir dan penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar dibidang pasar dengan menganggarkan dana yang memadai.
3. Membuat kebijakan pembinaan pedagang pasar selodang kelapa agar pedagang dapat tertata dalam berdagang di pasar selodang kelapa, lebih menfokuskan sarana fasilitas pasar agar kios-kios dapat berisi semua di pasar selodang kelapa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Fedyani Saifuddin. 2010. Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernism. Jakarta. Yayasan Pustaka.
- Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public. Yogyakarta
- Fahmi Irham. 2013. Perilaku Organisasi. Teori, Aplikasi dan Kasus, Bandung: Alfabeta
- Handoko. T. Hani. 2011. Manajemen Personalialia Dan Sumber

- Manusia. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- John M. Ivancevich. 2006. Perilaku dan Manajemen Organisasi, Edisi Ke 7. Penerbit Erlangga.
- Kesumajaya, 2010. Pengaruh Struktur Modal Dan Pertumbuhan. Denpasar: Universitas Islam Indonesia
- Kertapraja, E. Koswara 2002. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta : Candi Cipta Paramuda.
- Lukman, Sampara, 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan
- Melayu, S.P. Hasibuan. 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Cetakan 9. PT. Bumi Aksara
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono A.G. 2005. Analisis Kebijakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2006. Metodologi Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Sule dan Saefullah, 2005. Pengantar Manajemen, Jakarta : Kencana
- Sulistiyani Ambar Teguh. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutarto, 2006. Dasar-Dasar Organisasi. Gajah Mada University: Press Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2005. Perilaku Organisasi: Konsep Dasar Dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2007. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winardi. 2002. Kepemimpinan Dalam Manajemen . Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Winardi. 2006. Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Literatur/Skripsi**
- Adhansyah. Junrian (2016), Pelaksanaan Mekanisme Pengurusan Izin Usaha Toko Modern (Iutm) Ritel Alfamart Di Kota Pekanbaru: Universitas Riau
- Khoiri, Ilham, (2016), Pelaksanaan Tugas Pegawai Dalam Pelayanan Surat Izin Tempat Usaha Pada Kantor Kecamatan Sail Pekanbaru: Universitas Riau
- Dokumen
- Nota Kesepakatan Antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Daerah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Peraturan Walikota Pekanbaru  
Nomor 96 Tahun 2015  
Tentang Pendelegasian  
Kewenangan Pelaksanaan Izin  
Usaha Mikro dan Kecil Dari  
Walikota Kepada Camat.

Perjanjian Kerjasama Antara Direktur  
Jenderal Bina Pembangunan  
Daerah,Deputi  
Pengembangan Dan  
Reksturasi Usaha,Direktur  
Jenderal Perdagangan Dalam  
Negeri.Direktur Utama Pt  
Bank Rakyat Indonesia  
(PERSERO),Tbk Dan Ketua  
Asosiasi Perusahaan  
Perjaminan Indonesia  
(ASIPINDO)

**Media Internet**

[Http://Bisnisukm.com/Pedoman-  
Pengurusan-Izin-Usaha-  
Mikro-dan-Kecil-Iumk-  
HTML](http://Bisnisukm.com/Pedoman-Pengurusan-Izin-Usaha-Mikro-dan-Kecil-Iumk-HTML)

[http://Www.Pikiran-  
Rakyat.Com/Berita-  
Pemko/3221-Izin.UMKM-  
Akan dilimpahkan - pada-  
Kecamatan/](http://Www.Pikiran-Rakyat.Com/Berita-Pemko/3221-Izin.UMKM-Akan-dilimpahkan-pada-Kecamatan/)

[http://logisnews.co/id-3203-read-  
pemko-pekanbaru-luncurkan-  
izin-Usaha-Mikro-Kecil](http://logisnews.co/id-3203-read-pemko-pekanbaru-luncurkan-izin-Usaha-Mikro-Kecil)